PENGARUH INVESTASI DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Diajukan Oleh:

Vivi Devianti Al Farima

4516 011 012

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	: Pengaruh Investasi Dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan
Nama mahasiswa	: Vivi Devianti Al Farima
No. Stambuk	: 4516011012
Program studi	: Ekonomi Pembangunan
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis

Telah Disetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.Haeruddin Saleh, SE.,M.Si	**Syamsuddin Jafar, SE.,M.Si**

Mengetahui dan Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa	Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Dr.H.A.Arifuddin Mane, SE.,M.Si.SH.MH	**Rafiuddin,.SE.,M.Si**

PERNYATAAN KOERISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vivi Devianti Al Farima

Nim : 4516011012

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Pengaruh Investasi Dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, September 2020

METERAI TEMPEL
6661CAHF709445709
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Vivi Devianti Al Farima

THE IMPACT OF INVESTMENT AND GOVERNMENT SPENDING ON ECONOMIC GROWTH IN SOUTH SULAWESI PROVINCE

By:

Vivi Devianti Al Farima

Development Economics Study Program

Faculty of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

Vivi Devianti Al Farima, 2020. The Impact of Investment and Government spending on Ecconomic Growth in South Sulawesi Province. Guided by Dr. Haeruddin Saleh, SE.,M.Si and Syamsuddin Jafar, SE.,M.Si

The purpose of this study was to see effect of investment and Government sepending on Economic Growth in South Sulawesi Province.. Then, The data were analyzed by using quantitative method. This study provides information on the impact of Investment and Government spending on economic growth in South Sulawesi Province.

The result of this study indicate that Investmant and Government spending have an effect on economic growth in south sulawesi province, that domestic investment has no significant effect on economic growth in south sulawesi province, while foreign investment and goverment spending have a significant effect on economic growth in south sulawesi province.

Keywords ; Economic Growth, Investment, Government Spending

PENGARUH INVESTASI DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Oleh:

Vivi Devianti Al Farima

Program studi Ekonomi pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas bosowa

ABSTRAK

Vivi Devianti Al Farima.2020. Pengaruh investasi dan belanja pemrintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sulawesi selatan di bimbing oleh Dr. Haeruddin Saleh, SE.,M.Si dan Syamsuddin Jafar, SE.,M.Si.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh investasi dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sulawesi selatan. Kemudian data di analisis menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini memberikan informasi mengenai pengaruh investasi dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sulawesi selatan.

Hasil penelitian ini menunjukan pengaruh investasi dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diprovinsi sulawesi selatan, bahwa penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sulawesi selatan sedangkan penanaman modal asing dan belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sulawesi selatan.

Kata kunci: Pertumbuhan ekonomi, Investasi, Belanja Pemerintah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis khaturkan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan kekukuatan, kesabaran, dan ketabahan sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul " Pengaruh Investasi Dan Belanja Pemerintah, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan".

Penulisan skripsi ini bermaksud untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk menyelesaikan studi pada program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya bimbingan dan motivasi serta bantuan dari berbabgi pihak baik moril maupun materil. Proses penelitian skripsi ini banyak kendala, namun berkat bantuan bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan Berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua saya terutama kepada ibu saya tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan dan mendoakan bagi penulis.dan semoga penulis membuat Alm. Ayah bangga pada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M. Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa.

3. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
4. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar, SE.,M.Si. selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
5. Bapak Rafiuddin,SE., Msi selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Bosowa Makassar.
6. Kepada Bapak Dr. Haeruddin Saleh, SE.,M.Si dan Bapak Syamsuddin Jafar, SE.,M.Si. sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penulis.
7. Seluruh Dosen dalam lingkungan Universitas Bosowa yang telah mendidik dan memberikan bantuannya kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
8. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, para stafnya.
9. Ibu Ir.Iffah Rafida Djafar, ST.,MT selaku Kepala Dinas Penanaman Modal telah bersedia menerima dan memberikan data – data kepada penulis sehubungan dengan pembahasan skripsi ini.
10. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan Mahasiswa terkhusus kelas IESP 2016 sahabat saya yang telah bersama dalam suka dan duka selama di bangku kuliah .
11. Ucapan terimakasih juga pada BASECAMP telah menjadi teman terbaik dalam masa kuliah ini terima kasih Ana, Ila, Sasmita, Kyo, Livia, dan Dhea

12. Terima kasih juga saya ucapkan pada hady telah menjadi teman diskusi dan memberikan masukan dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan terima kepada seluh pihak terkait telah membantu dan memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Dengan segala kerendahan hati penulis harapkan adanya kritikan dan saran guna penyempurnaannya.

Makassar, 2 Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .... **i**

HALAMAN PENGESAHAN .... **ii**

PERNYATAAN KOERSINILAN .... **iii**

ABSTRAK .... **iv**

KATA PENGANTAR .... **vi**

DAFTAR ISI .... **ix**

DAFTAR TABEL .... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Maslah 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**

2.1 Kerangka Teori 8

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi 8

2.1.2 Teori Investasi 13

2.1.3 PMA 14

2.1.4 PMDN 19

2.1.5 Teori Pengeluaran Pemerintah 20

2.1.6 Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro 21

2.1.7 Pengeluaran Pemerintah Secara Makro 22

2.1.8 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah 22

2.1.9 Hubungan Antara Variabel 25

2.2 Kerangka Pikir 28

2.3 Hipotesis 29

BAB III METODE PENELITIAN 31

3.1 Daerah Dan Waktu Penelitian 31

3.2 Metode Pengumpulan Data 31

3.3 Jenis Dan Sumber Data 31

3.4 Metode Analisis 32

3.4.1 Asumsi Klasik 33

3.4.2 Pengujian Hipotesis 34

3.5 Definisi Operasional 36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 37

4.1 Gambaran Umum 37

4.1.1 Keadaan Geografis Provinsi Sulawesi Selatan 37

4.1.2 Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Selatan 41

4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan 43

4.1.4 Investasi 45

4.1.5 Belanja Pemerintah 48

4.2 Analisis Data 51

4.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik 51

4.2.2 Pengujian Hipotesis 52

4.3 Pembahasan 57

4.3.1 PMDN 57

4.3.2 PMA 58

4.3.3 Belanja Pemerintah 59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 61

5.1 Kesimpulan 61

5.2 Saran 61

DAFTAR PUSTAKA **62**

LAMPIRAN **65**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : PDRB Atas Dasar Konstan Menurut Pengeluaran..... 3

Tabel 4.1.1 : Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan..... 40

Tabel 4.1.2 :Pertumbuhan penduduk sulawesi selatan 41

Tabel 4.1.3 :Pertumbuhan Ekonomi atas harga konstan 44

Tabel 4.1.4: Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Selatan 46

Tabel 4.1.5 :Realisasi Belanja pemerintah menurut jenis pengeluaran 50

Tabel 4.2.1:Hasil Uji Autokorelasi 51

Tabel 4.2.2: Hasil Uji Determinasi (R^2)..... 52

Tabel 4.2.3: Hasil simultan (Uji F) 53

Tabel 4.2.4: Hasil Uji Parsial(Uji t) 54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indokator yang sangat penting untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu daerah. Suatu daerah mengevaluasi hasil pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Kemudian agar dapat memberikan efek yang mampu meningkatkan kesjahteraan masyarakat. Menurut Sadono Sukirno, 2011 pertumbuhan ekonomi ialah sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Salah satu indikator keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi disuatu daerah. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat diartikan sebagai gambaran menegenai dampak dari kebijakan - kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah ekonomi makro dalam jangka panjang. Dalam hal ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan meningkatkan investasi. Investasi disebut juga dengaan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan salah satu komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat atau pembelanjaan yang dilakukan dalam perekonomian di waktu tertentu. Menurut Henry Simamora (2000), Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan

untuk menambah atau pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi (misalnya pendapatan bunga, royalty, deviden, pendapatan sewa dan lain – lain), untuk apresiasi nilai investasi itu sendiri, ataupun manfaat untuk perusahaan yang berinvestasi. Manfaat inilah yang diperoleh melalui hubungan dagang. Dengan demikian investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman – penanaman modal dan perlengkapan – perlenkapan produksi untuk menambah kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Di provinsi sulawesi selatan misalnya, investasi dibagi menjadi dua bagian yaitu investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi sektor pemerintah dilakukan untuk menyediakan barang publik, sedangkan investasi sektor swasta adalah investasi yang dilakukan dalam negeri ataupun luar negeri (asing). Tujuan utama investasi adalah memperoleh keuntungan dan pendapatan di masa depan dengan mengantisipasi tekanan inflasi. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terdapat hubungan yang positif antara investasi dan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Dan salah satu cara untuk mengamati laju perekonomian adalah dengan memakai indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga biasanya digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi disuatu daerah.

Tabel 1.1
PDRB Atas Dasar Konstan Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)
Sulawesi Selatan Tahun 2011 – 2019

Tahun	PDRB (Milyar)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PMDN (Milyar Rp)	PMA (US$)	Belanja Pemerintah (Milyar Rp)
2011	185.708.474	8,13	3.986.300.000	89.600.00	3.401.081.587
2012	202.184.588	8,87	2.318.900.000	582.600.000	4.646.301.676
2013	217.589.132	7,62	921.000.000	462.800.000	5.646.027.117
2014	233.988.051	7,54	4.949,600.000	280.900.000	9.842.842.657
2015	250.802.993	7,9	9.215,300.000	233.300.000	6.415.560.016
2016	269.401.313	7,42	3.334,600.000	372.500.000	7.292.544.165
2017	288.814.171	7,21	1.969,400.000	712.800.000	9.285.460.824
2018	309.243.627	7,07	3.275,900.000	617.200.000	9.444.558.008
2019	330.605.133	6,92	5.627,600.000	302.600.000	10.099.896.556

Sumber : Data diolah Badan Pusat Statistik sulsel

Berdasarkan pada tabel 1.1 terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan ditahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2013 mengalami perlambatan sebesar 7,62% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang jumlah peningkatannya 8,87%. Hal ini dapat disebabkan oleh menurunya tingkat investasi maupun belanja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari sumber daya alam yang dimiliki sulawesi selatan mempunyai kemungkinan yang sangat besar untuk melakukan aktifitas penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) Dengan banyaknya tersedia berbagai bahan mentah dari berbagai sektor misalnya sektor pertanian, perkebunan dan juga potensi daerah yang dapat dijadikan objek wisata sehingga potensi daerah ini diberdayakan maka sangat besar manfaat yang dapat dihasilkan devisa Negara dan juga menunjang tejadinya kegiatan di daerah tersebut yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada dasarnya investasi merupakan pembentukan modal yang mendukung peran swasta dalam perekonomian diperlukan investasi – investasi baru sebagai stok modal yaitu PMDN dan PMA.

Produk Domestik Regional bruto (PDRB), salah satu indikator yang sangat penting untuk mengetahui kondisi ekonomi yang menggambarkan kemajuan, pertumbuhan ekonomi, mempunyai kelebihan dan kekurangan di berbagai sektor dalam struktur perekonomian. Kemajuan dan pertumbuhan dapat dilihat dari kegiatan ekonomi yang telah dilakukan dengan menganalisa sektor – sektor yang memberikan kontribusi yang paling besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Sulawesi Selatan. Perkembangan terlihat pada priode tertentu dapat pula melihat keunggulan dan kelemahan struktur ekonomi di suatu daerah. Perekonomian di Sulawesi Selatan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sektor – sektor yang dapat menyumbang pendaptan atau nilai tambah meliputi sektor investasi dan belanja pemerintah. Misalkan, investasi dalam peralatan modal ataupun pembentukan modal tetapi dapat memberikan kesempatan kerja untuk masyarakat. Dengan demikan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.

Belanja pemerintah merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dalam bentuk stimulus pada tahap awal perkembangan. Hsl ini terkait dengan belanja pemerintah memiliki peran seabagai instrumen fiskal melalui fungsi distribusi, alokasi dan stabilitas. Pertumbuhan suatu perekonomian tidak terlepas dari peran pemerintah. Sadono Sukirno (2000) , peran pemerintah masih sangat penting dalam perekonomian untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menetukan besarnya pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam APBD setiap tahunnya, Kebijakan pengeluaran pemerintah dapat dilihat pada APBD dari total pengeluran pemerintah yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Pengeluaran pemerintah yang sangat kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang stabil akan memacu pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang berlebihan akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Dari hal – hal yang telah dijelaskan diatas maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan adalah dengan memacu sektor – sektor yang mempunyai pertumbuhan yang

tinggi. Dengan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dapat dicapai dengan beberapa faktor pendukung seperti sumber daya alam yang tersedia, investasi, dan belanja pemerintah yang tercantum pada APBD. dengan demikian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

1.2 Rumusan masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah pokok yaitu bagaimana pengaruh Investasi dan Belanja pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi?

1.3 Tujuan penelitian

Bedasarkan masalah yang telah diajukan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh Investasi dan Belanja pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 – 2018.

1.4 Manfaat penelitian

a. Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan pengetahuan mengenai masalah keuangan daerah.
b. Sebagai acuan bagi peneliti lainnya yang berada di bidang yang sama terutama pada mahasiswa Universitas Bosowa sebagai bahan referensi.
c. Memberikan masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah daalam jangka panjang dari satu periode ke periode berikutnya.

Pertumbuhan ekonomi (economic Growth) adalah suatu perkembangan kegiatan dalam perekonomi yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor – faktor produksi, pada umumnya tidak selalu diikuti oleh petambanhan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian pekembangan ekonomi ialah lebih lambat dari potensinya

Para ekonom mempunyai pandangan yang tidak selalu sama mengenai proses pertumbuhan suatu perekonomian. Harrod – domar (1948), menyatakan bahwa penanaman modal atau pembentukan modal merupakan salah satu faktor utama tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang teguh dan stabil dalam jangka panjang. Harrod – Domar mengemukakan Syarat – syarat yang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan stabil dalam jangka panjang didalam pertumbuhan yang stabil semua variabel output, tabungan, investasi, dan kemajuan teknologi, masing – masing tumbuh secara konstan atau pada laju lurus secara eksponensial.

Peranan pembentukan modal tetap harus ditekan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, menurutnya pembentukan modal dipandang sebagai suatu pengeluaran yang akan menanmbah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang – barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif masyarakat, agar perekonomian bisa tumbuh maka dilakukan investasi – investasi sebagai stok kapital. Teori pertumbuhan di bagi menjadi dua dapat dikelompokkan dalam beberapa teori yaitu :

1. Teori pertumbuhan ekonomi klasik

   Menurut para ahli ekonomi klasik seperti adam smith dan david ricardo ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu:

   a. Jumlah penduduk
   b. Persediaan barang – barang modal
   c. Luas tanah dan kekayaan alam
   d. Penerapan teknologi

Adam smith mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada pertumbuhan penduduk. Dengan demikian maka akan terdapat pertambahan output. Asumsi klasik menyatakan bahwa tinggi rendahnya pertumbuhan tercermin pada pertumbuhan output yang dihasilkan. Tinggi rendahnya pertumbuhan output yang dicapai akan dipengaruhi oleh 3 komponen yaitu : sumber – sumber alam, tenaga kerja (pertumbuhan penduduk, jumlah persedian barang modal.

2. Teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik

   Teori model pertumbuhan neo-klasik menjelaskan bahwa faktor petumbuhan ekonomi dapat dilihat dengan ; adanya akumulasi kapital merupakan faktor yang penting dalam pembangunan ekonomi, perkembangan adalah suatu proses yang kumulatif dan harmonis, adanya pemikiran optimis terhadap perkembangan. Robert Solow dan Trevor Swan mengemukakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi akan tergantung pada pertambahan penyediaan faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi kapital) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini yang didasari oleh anggapan Klasik, bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (full employment), dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Jadi, sampai mana perekonomian akan

berkembang tergantung pada pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi.

Menurut budiono 1994, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses prtumbuhan output perkapita dalam jangka panjang yang dimana terjadi peningkatan apabila output berasal dari sumber proses perekonomian itu sendiri dan bersifat sementara.

A. Faktor – faktor Pertumbuhan ekonomi

1. Sumber daya manusia

   Sumber daya manusia memiliki faktor yang penting dalam peroses pembanguna ekonomi. Sumber daya manusia selaku subjek harus memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah.

2. Sumber daya alam

   Sumber daya alam tidak dapat berhasil dalam pembangunan ekonomi tanpa didukung poleh sumber daya manusia yang ada dalam mengelola sumber daya alam yang sudah ada. Seperti tanah,tambang dan lain sebagainya

3. Ilmu pengetahuan dan teknologi

   Pekembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat mampu mendorong pembangunan. Dengan perganti alat kerja ke mesin – mesin canggih dan cepat akan memberikan waktu yang efisien, kualitas dan kuantitas dalam rangkaian

pembangunan ekonomi yang kemudian memperceoat laju pertumbuhan ekonomi.

4. Budaya

   Budaya membeikan dampak pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi dapat menjadi pembangkit ataupun pendorong proses pembangunan namun dapat juga menjadi penghambat pemabngunan. Budaya yang merupakan dapat menjadi pendorong adalah sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan lain sebagainya. Budaya yang menjadi penghambat pembangunan adalah bersikap anarkis, egois, boros, korupsi kolosusi dan nepotiseme.

5. Sumber daya modal

   Sumber daya modal dibutuh oleh manusia untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek. Sumber daya modal adalah barang – barang modal yang sangat penting untuk perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi dan barang modal dapat meningkatkan produktivitas.

B. Manfaat Pertumbuhan Ekonomi

1. Pendapatan perkapita masyarakat lebih tinggi
2. Pinjaman pemerintah lebih rendah
3. Peningkatan pelayanan publik
4. Investasi meningkat

5. Peningkatan penelitian dan pengembangan
6. Evaluasi pembangunan ekonomi

2.1.2 Teori Investasi

Investasi berasal dari kata *Invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan modal atau uang. Investasi di definisikan sebagai pengeluaran pemerintah untuk membeli barang – barang modal yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu yang lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang (Sunariyah, 2003) . Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. . Dalam pasal 1 ayat (1) Undang – undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal ada dua status disebutkan bahwa penanaman modal diartikan sebagai bentuk kegiatan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing agar dapat melakukan usaha di negara/ daerah. Jenis Investasi berdasarkan pembiayaan merupakan asal usul investasi yang di peroleh investasi dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA)
2. Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN)

Investasi menurut Tandelilin adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang Tandelilin (2010:2**)**.

investasi menurut Martono dan D.Agus Marjito (2002) adalah penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan kedalam suatu asset (aktiva) dengan harapan memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang.

Pengertian investasi menurut Nanga adalah tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada atau bisa juga disebut akumulasi modal. Nanga (2001:124)

investasi menurut Sudono adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan (Sudono 2000)

Investasi menurut Kasmir dan Jakfar merupakan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidan usaha. Penanaman modal yang ditanam dalam artian sempit berupa proyek tertentu baik yang bersifat fisik ataupun non fisik, seperti proyek pendirian pabrik, jalan, jembatan, pembangunan gedung dan proyek penelitian, dan pengembangan **(**Kasmir dan Jakfar**,** 2012**)**

2.1.3 PMA

Menurut undang undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik indonesia yang dilakukan

oleh penanaman modal asing. Baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Menurut krugman 1991, PMA adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain tersebut. PMA memiliki klasifikasi menjadi beberapa bagian yaitu berdasarkan arah alirann modal, target dan motif , nan jika dilihat berdasarkan arah aliran modal ada dua tipe yaitu:

1. PMA masuk *(Inward* FDI)

   Murupakan penanaman modal asing yang dimilik modal asing untuk di investasikan pada kegiatan ekonomi domestik. Penanaman Modal Asing yang masuk dapat mendorong dengan adanya penghapusan pajak, subsidi, pinjaman dan berbagai hambantan untuk dihapuskan. Dengan demikian diberikna pertimbangan keuntungan dalam waktu jnagka panjang adanya Penanaman Modal Asing mempunyai manfaat yang sangat besar dibandingkan dengan mengurangi pendapatan negara dalam jangka pendek terkait dengan fasilitas yang diberikan tersebut. Penanaman Modal Asing dihambat dengan adanya keterbatasan dalam kepemilikan saham dan persyaratan yang memiliki perbedaan antara investasi asing dan invetasi domestik.

2. Penanaman Modal Asing (*outward* FDI)

   Merupakan Penanaman Modal Asing yang dengan modal yang berasal dari domestik di investasikan ke luar negeri. Investasi ini dapat dilakukan dalam rangka meng ekspor impor komoditas negara asing. Penanaman Modal Asing dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

   a. *Greenfield Investment* adalah investasi secara langsung untuk melskukan kegiatan bisnis yang telah berjalan. Investasi ini merupakan target utama dari negara yang menerima. Penanaman Modal Asing *host* country investasi tersebut dapat menghasilkan kapasitas produksi yang baru ,lapangan pekerjaan, transfer teknologi, dan memperluas hubungan pasar modal.

   b. *Merger and Acquistions* adalah sesuatu yang terjadi dengan adanya pemindahan kepemilikian aset berasal dari perusahan domestik pada perusahaan asing. Hal ini berbeda dengan *Greenfield Investment* , Merger and Acquistions memiliki manfaat yang berbeda dengan tidak memberikan keuntungan jangka panjang perekonomian domestik.

   c. PMA Horizontal

      Penanaman modal asing horizontal akan terjadi ketika investasi yang dilakukann di luar negeri memiliki persamaan dengan investasi yang dilakukan di dalam negeri.

d. PMA Vertikal

Penanaman Modal Asing vertikal di bagi menjadi dua jenis yaitu:

1. *Backward Vertical* dimana Penanaman Modal Asing apabila investasi yang berada diluar negeri memiliki fungsi untuk menyediakan input bagi perusahaan yang berada di dalam negeri
2. *Forward Vertical* dimana penanaman modal asing yang dilakukan investasi di luar negerti untuk melakukan penjualan produk yang telah dihasilkan oleh perusaan di dalam negeri.

Penanaman Modal asing juga dapat di bagi berdasarkan motif atau alasan melakukan investasi:

1. *Resource-seeking* merupakan investasiyang dilakukan untuk memperoleh faktor produksi dengan lebih efisien pada luar negeri dibandingkan dengan di peroleh domestik
2. *Market-seeking* merupakan investasi yang dilakukan dengan tujuan membuka pasar baru maunpun menjaaga pasar yang sudah ada.
3. *Efficiency-seeking* merupakan investasi yang dilakukan untuk mendorong keinginan dalam meningkatkan keuntungan melalui skalaa ekonomi. Maka setelah

dilakukan investasi dari resource-seeking dan market-seeking telah di realisasikan , maka akan dilakukan investasi yang memiliki harapan dan lebih besar dari keuntungan yang didapatkan.

4. *Startegic asset-seeking* merupakan investasi yang dilakukan dengan taktis dengan mencegah terjadinya penguasaan atas sumber alam oleh perusahaan pesaing.

Penanaman modal asing memiliki karakteristik yang lebih baik dari modal portofolio, yaitu dimana relatif lebih stabil dan memiliki kontribusi dalam suatu proses produksi. Manfaat bagi negara penerima mendorong aliran masuk Penanaman modal asing yaitu:

1. Investasi asing memberikan keuntungan dengan akses pasar Ekspor
2. Investasi asing mampu mendorong peningkatan dalam investasi domestik
3. Investasi asing dapat meningkatkan kompetisi di dalam perekonomian negara penerima investasi
4. Perusahaan asing memiliki teknologi yang lebih tinggi untuk dilakukakan pemanfaat pada negara penerimaa.
5. Investasi asing mampu membantu kesenjangan dalam kebutuhan valuta asing di negara penerima

A. manfaat PMA

- Mampu meningkatkan kesejahteraan masyakarakat
- Menciptakan lapangan kerja
- Proses ahli teknologi dan keterampilan yang bermanfaat
- Sumber tabungan atau devisa bagi negara

B. faktor – faktor mempengaruhi PMA

- Nilai tukar
- PDRB
- Tingkat inflasi
- Upah
- Biaya pajak

2.1.4 PMDN

Istilah penanaman modal dalam negeri berasal dari bahasa inggris, yaitu *domestic investment.* Menurut pasal 1 angka 2 Undang – undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal menyatakan bahwa. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanaman modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pihak yang dapat menjadi penanaman modal dalam negeri adalah menurut Undang – undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal adalah:

1. Orang – Perorangan Warga Negara Indonesia
2. Badan Usaha Indonesia
3. Badan Hukum Indonesia
   a. Manfaat PMDN
      - Menghemat devisa
      - Mengurangi ketergantung pada produk asing
      - Mendorong kemajuan industri dalam negeri
      - Memberikan penyediaan dalam upaya penyerapan tenaga kerja
   b. Faktor – faktor mempengaruhi PMDN
      - Potensi suatu daerah
      - Budaya masyarakat
      - Kecermatan pemerintah dalam menentukan kebijakan
      - Peta politik daerah dan nasional

2.1.5 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) merupakan kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalan perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin pada dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari kebijakan

fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja, agar memacu dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Guritno (1999) pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan – kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang atau jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan pengeluaran yang harus dlakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Belanja pemerintah dibagai menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Suatu kegiatan tidak akan terlaksana tanpa adanya dana tersebut. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berkaitan langsung dengan program dan kegiatan.

2.1.6 Pengeluaran pemerintah secara mikro

Pengeluaran pemerintah merupakan menganalisis faktor – faktor yang akan meningkatkan perrmintaan pada barang publik dan faktor yang memiliki pengaruh terhadap tersedianya barang publik.

Pengeluaran pemerintah untuk ketersedian barang publik akan memberikan pengaruh terhadap pengeluaran pemerintah.

Pekembangan pengeluaran pemerintah mempengaruh faktor – faktor dibawah ini:

a. Perubahan permintaan barang publik
b. Perubahan kualitas barang publik
c. Perubahan harga faktor produksi

2.1.7 pengeluaran pemerintah secara makro

menurut wagner pengeluaran pemerintah yang semakin membesar akan memberikan dampak terhadap GNP. Dalam suatu hukum yang dikemukakan oleh wegner menyatakan bahwa: di suatu perekonomian jika pendapatan perkapitanya meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat.

Dalam hal ini pemerintah memiliki peranan yang sangat besar terhadap pengeluaran disetiap periode.

Menurut pandangan wegner dalam teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state)* dimana pemerintah dianggap individu yang bebas untuk bertindak tanpa memikirkan masyarakatnya

2.1.8 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Berdasarkan pada permendagri nomor 13 Tahun 2006 pasal 31 ayat 1 belanja pemerintah daerah di kalasifikasi menjadi urusan wajib, urusan pilihan atau belanja daerah menurut orgnisasi , fungsi, program kerja, dan jenis belanja pemerintah.

1. Belanja menurut urusan wajib

   Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 32 ayat 2, belanja menurut urusan wajib yaitu terdiri dari:

   a. Pendidikan
   b. Kesehatan
   c. Pekerjaan umum

d. Perumahan Masyarakat

e. Penataan Ruang

f. Perencanaan Pembangunan

g. Perhubungan

h. Lingkungan Hidup

i. Kependudukan Dan Catatan Sipil

j. Pemberdayaan perempuan

k. Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera

l. Sosial

m. Tenaga kerja

n. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

o. Penanaman Modal

p. Kebudayaan

q. Pemuda dan Olah Raga

r. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

s. Pemerintahan Umum

t. Kepegawaain

u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

v. Statistik

w. Arsip, dan

x. Kemunikasi dan informatika

2. Belanja menurut urusan pilihan

a. Pertanian

b. Kehutanan

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

d. Parawisata

e. Kelautan dan Perikanan

f. Perdagangan

g. Perindustrian, dan

h. Transmigrasi

3. Belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi , fungsi program dan kegiatan maupun jenis belanja dapat dibagi menjadi dua yaitu

   1. Belanja tidak langsung

      a. Belanja pegawai

      b. Bunga

      c. Subsidi

      d. Hibah

      e. Bantuan sosial

      f. Belanja bagi hasil

      g. Bantuan keuangan, dan

      h. Belanja tak terduga

   2. Belanja langsung

      a. Belanja pegawai

      b. Belanja barang dan jasa, dan

      c. Belanja modal

2.1.9 Hubungan Antara Variabel

Investasi merupakan menciptakan dan menambah kapasitas produksi atau pendapatan dimasa yang akan datang dengan permintaan barang dan jasa. Pembentukan investasi masyarakat tidak menggunakan seluruh pendapatannya untuk dikomsumsi, namun sebagian ditabung dan tabungan ini digunkan untuk pembentukan investasi. Maka pembrntukan investasi ini menjadi salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, investasi yang dilakukan dalam peralatan modal dan oembentukan modal tidak hanya meningkatkan produksi maupun pertumbuhan, namun dapat memberikan kesempatan kerja pada masyarakat. Maka terdapat hubungan yang positif pembentukan investasi pada pertumbuhan ekonomi pada suatu periode .

a. Hubungan PMDN terhadap Pertumbuhan Ekonomi

   penanaman modal dalam negeri (PMDN) merupakan pengeluaran atau pembelanjaan modal suatu perusahaan untuk membeli barang produksi, agar mampu memproduksi barang dan jasa yang sudah tersedia dalam perekonomian yang merupakan hasil dari penanaman modal dalam negeri. Dengan investasi dapat menghimpun akumulasi modal agar dapat membangun beberapa gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan yang lebih produktif, maka secara sistematis output suatu daerah akan meningkat dengan tujuan untuk meningkatkan petumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan meningkat. Jumlah output dan pendaptan yang memiliki yaitu

Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri memilik peran penting dalam hal ini. Investasi dengan kebijakan tingkat suku bunga dan pajak merupakan kekuatan ekonomi yang utama. Dengan demikian Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Hubungan PMA terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penanaman Modal Asing merupakan kesempatan yang dilakukan oleh negara yang sedang berkembang untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal yang dapat dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi maka dapat dilakukan pada struktur produksi dalam sumber dana transformal srtuktural. Penanaman Modal Asing dapat menjadi sumber persediaan tabungan, tabungan devisa, penerimaan pemerintah dan keahlian manajerial pada negera penerimanya dengan tingkat persedian yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian Penanaman Modal Asing memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

c. Hubungan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja pemerintah suatu yang dapat mencerminkan kebijakan – kebijakan pemerintah dalam memenuhi barang dan jasa, belanja pemerintah biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan kebijakan yang telah ditetapkan. Tingkat pendapatan di pengaruhi oleh belanja pemerintah dan pajak makan akan mengalami

perubahan pada tingkat pendapatannya. Kebijakan fiskal dalam hal ini memberikan kemungkinan untuk agar perekonomian menjadi stabil. Belanja pemerintah memiliki hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi , dimana setiap peningkatan dari belanja pemerintah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi diukur dengan pendapatan dan tingkat outputnya (Mankiw, 2003).

2.2 Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis, dimunculkan kerangka pikir untuk menjelaskan PMA, PMDN, Belanja pemerintah terhadap prtumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi selatan. PMDN memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi beserta investasi asing PMA juga sangat penting artinya bagi pembangunan ekonomi. Penanaman modal yang dialokasikan dalam proyek pembanguan berarti akan menambah kapital yang dimana akan berakibat pada salah satu indikator yaitu pertumbuhan ekonomi. Dengan belanja pemerintah memiliki hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada pengeluaran yang mengarah kepada pembangunan ekonomi . dengan demikian dapat dilihat bahwa tingkat investasi dan belanja pemerintah adalah salah satu faktor dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

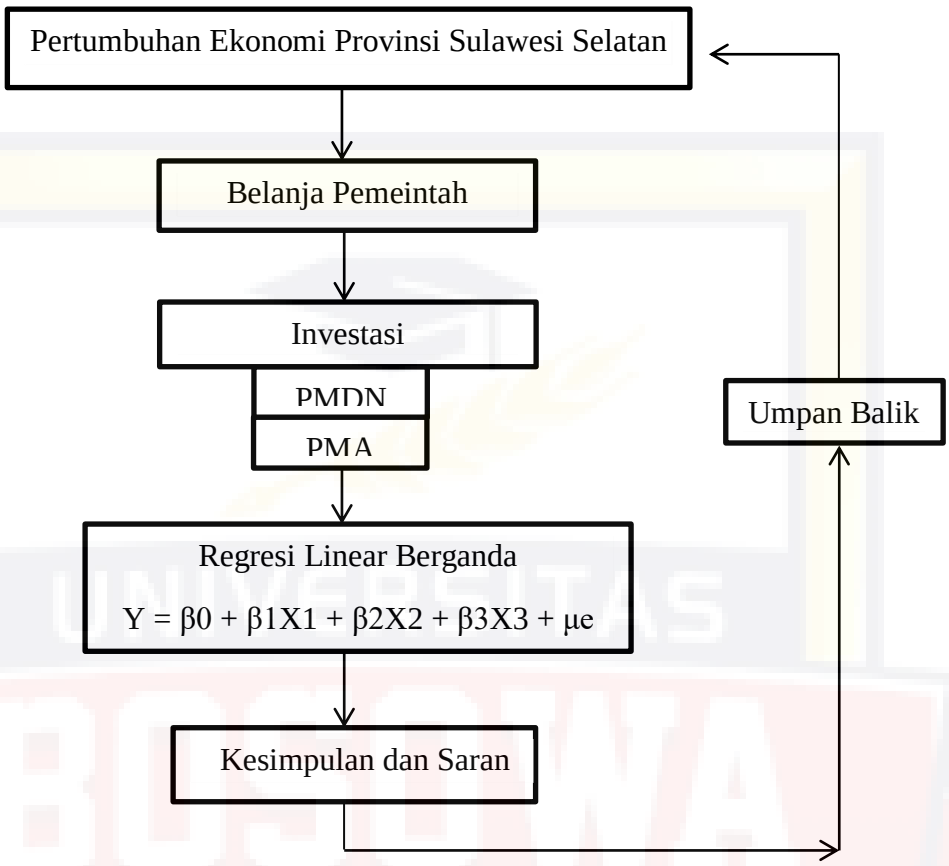

2.3 Hipotesis

Untuk mengarahkan hasil penelitian, disampaikan suatu hipotesis penelitian. Hipotesis ini akan diuji kebenarannya dan hasil ujian ini akan dapat dipakai sebagai masukan dalam menentukan kebijakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang dikemukakan dan masih lemah kebenarannya. Hipotesis juga dipandang sebagai konklusi yang sifatnya sementara. Sesuai dengan masalah diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

1. diduga bahwa PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sulawesi selatan periode 2011 – 2019
2. diduga bahwa PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sulawesi selatan periode 2011 – 2019
3. Diduga belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sulawesi selatan periode 2011 – 2019
4. Diduga PMDN, PMA, dan Belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan secara stimulan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sulawesi selatan periode 2011 – 2019.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Daerah dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada Dinas Penanaman Modal Dan Badan Pusat Statistik . Adapun waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian yaitu 3 bulan terhitung pada bulan Maret sampai Juni 2020.

3.2 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan ini berupa pengumpulan – pengumpulan data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta instansi – instansi yang terkait lainnya yang berhubungan dalam data penelitian ini. Serta Penelitian Pustaka (Library Research), merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh informasi dari literatur yang terkait dengan penelitian ini, seperti jurnal penelitian, skripsi, dan buku terbitan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

3.3 Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data time series pada tahun 2014 sampai 2018 dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh scara tidak langsung melalui sumber yang ada. Serta melakukan analisis data kuantitatif dalam penelitian ini .

3.4 Metode analisis

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan analisis model Regresi Berganda *(Multiple Regression).* Persamaan regresi berganda adalah suatu persamaan yang melibatkan dua variabel atau lebih dalam analisis. Tujuanya ialah untuk menghitung parameter estimasi dan mengetahui apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dan memiliki pengaruh. Variabel yang diestimasikan adalah variabel dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi adalah variabel independen. Metode analisis ini memperlihatkan hubungan variabel independen dengan variabel dependen, yang digunakan untuk melihat besarnya pengaruh antara investasi (PMA & PMDN) dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai hasil penelitian ini serta dalam rangka menguji hipotesis sebagai jawaban sementara untuk pemecahan masalah yang dapat di kemukakan melalui persamaan:

$$\mathbf{Y = (X1, X2, X3) \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)}$$

Fungsi di atas kemudian di modelkan perhitungan dari persamaan linier sebagai berikut:

$$\mathbf{LnY = \beta 0 + \beta 1 Ln\ X1 + \beta 2 Ln\ X2 + \beta 3 Ln\ X3 + \mu e \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2)}$$

Dimana :

Y : Petumbuhan ekonomi

X1 : PMDN(Rp)

X2 : PMA(US$)

X3 : Belanja pemerintah(Rp)

β0 : Konstanta

β1, β2, β3 : Parameter yang akan diestimasi

μ : *Error Term*

3.4.1 Asumsi Klasik

1. Multikolineritas

Uji multikolineritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel *independen* yang memiliki kesamaan dengan variabel lain dalam satu model. Kesamaan antarvariabel dalam satu model yang menyebabkan terjadi kolerasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen lainnya. Maka untuk dapat menghindari proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing – masing variabel *independen* terhadap variabel *dependen.*

Dengan demikian untuk mengetahui pada satu model apat dilihat, jika nilai *variance inflation* (VIF) faktor tersebut tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan bebas dari multikolilineritas VIF = 1/*tolerance*, jika VIF = 10 maka *tolerance* = 1/10= 0,1 . Semakin tinggi tinggi VIF maka semakin rendah *tolerance.*

2. Autokorelasi

Autokorelasi adalah kolerasi yang terjadi diantara anggota - anggota dari serangkaian suatu observasi yang berdasarkan urutan waktu apabila datanya *time series.*Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu t-1 (sebelumnya). Jika terjadi kolerasi maka dapat disebutkan adanya masalah autokorelasi. Nilai Durtbin Watson yang dpat digunakan untuk melihat ada ditidaknya autokorelasi dalam model regresi. <1,10 adanya autokorelasi, 1,10 – 1,54 tidak adanya kesimpulan, 1,55 – 2,45 tidak ada autokorelasi, 2,46 – 2,90 tidak adanya kesimpulan, > 2,91 adanya autokorelasi.

3.4.2 Pengujian Hipotesis

1. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

   Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh peranan variabel independen terhadap variabel dependen, semakin besar (R^2) maka semakin besar pula peranan variabel dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai (R^2) adalah antara 0 dan 1.

2. Pengujian statistik f (Uji F)

   Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen keseluruhan signifikan secara statistik mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Maka dilakukan dengan pengujian nilai **F hitung** dan **F tabel** pada tingkat signifikasi 5

persen. Apabila nilai **F hitung** > dari nilai **F tabel** maka variabel bebas secara serentak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, atau hiptosesis diterima.

3. Pengujian signifikansi parameter parsial (Uji t)

   Uji ini adalah untuk melihat apakah pengaruh pada variabel independen terhadap variabel dependen bermakna atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai **t hitung** pada masing – masing variabel independen dengan nilai **t tabel** dengan tingkat signifikansi 5 persen. Apabila nilai **t hitung** > **t tabel** maka salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dengan demikian nilai – nilai tersebut dapat dketahui vriabel bebas mana yang mempunyai pengaruh yang paling dominan mempengaruhi variabel dependen.

   a. T hitung > t – tabel maka H0 ditolak , artinya bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
   b. T hitung < t – tabel maka H0 diterima, artinya bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5 Definisi Oprasional Variabel

1. Pertumbuhan ekonomi (Y) adalah proses perubahan kondisi perekonomian di suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode 2011 sampai 2019 di Provinsi Sulawesi selatan yang di ukur dalam satuan rupiah / persen.
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (X1) adalah realisasi kegiatan penanaman modal yang dilakukan untuk melakukan usaha di negara Republik Indonesia yang dilaksankan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri di periode 2011 – 2019 yang diukur dalam satuan rupiah.
3. Penanaman Modal Asing (X2) adalah realisasi dari penanaman modal yang dilakukan untuk melakukan usaha di Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing baik dengan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan selama periode 2011 – 2019 yang diukur dalam satuan US dollar
4. Belanja Pemerintah (X3) adalah realisasi dari pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah untuk melakukan pembangunan suatu daerah baik belanja langsung dan belanja tidak langsung atau belanja lainnya. Pengeluaran pemerintah merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk belanja barang dan jasa dari periode 2011 – 2019 dalam satuan rupiah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum

4.1.1 Keadaan Geografis Provinsi Sulawesi Selatan

Secara astronomis Sulawesi Selatan terletak antara 0˚12’ Lintang Selatan dan 8˚ Lintang Selatan yang berada diantara 116˚48’ - 122˚36’ Bujur Timur. Berasal dari posisi geografis ysng berada pada Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai batas – batas . Bujur Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di Sebelah Utara dan Teluk Bone serta Sulawesi Tenggara disebelah Timur. Batas Sebelah Barat dan Selatan berbatasan masing – masing merupakan selat makassar dan laut flores. Berdasarkan letak geografis Sulawesi Selatan memiliki dua kabupaten kepulauan, yaitu Kepulauan Selayar dan Pangkajene (Kepulauan Pangkep).

Sulawesi Selatan merupakan sebuah provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak pada bagian selatan Pulau Sulawesi. Ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan merurpakan Makassar atau dulunya disebut dengan Ujung Pandang. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah 45.764,53 Km Persegi. Kabupaten luwu utara merupakan kabupaten terluas dengan luas 7.502,68 km persegi luas kabupaten tersebut adalah 16,39 persen dari seluruh wilayah di Sulawesi Selatan sedangkan bantaeng merupakan

kabupaten dengan luas wilayah yang paling kecil dengan luas wilayah 99,33 km persegi atau 0,22 persen dari wilayah Sulawesi Selatan

Berdasarkan administrasi Provinsi Sulawesi Selatan terbagi atas 24 kabupaten/kota yang terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 kota yaitu:

- Kepulauan selayar
- Bulukumba
- Bantaeng
- Jeneponto
- Takalar
- Gowa sinjai
- Maros
- Pangkep
- Barru
- Bone
- Soppeng
- Wajo
- Sidrap
- Pinrang
- Enrekang
- Luwu
- Tanatoraja
- Luwu utara

- Luwu timur
- Toraja utara

Dan kota:

- Makassar
- Pare – Pare
- Palopo

Jumlah sungai yang mengalir di wilayah Provinsi Sulawesi selatan adalah sekitar 67 aliran sungai, dengan aliran yang terbesar berada pada Kabupaten Luwu yaitu 25 aliran sungai. Salah satu sungai terpanjang pada sungai Saddang yang mengalir melewati Tator, Enrekang dan Pinrang. Panjang sungai tersebut masing – masing 150km.

Provinsi sulawesi selatan memiliki empat danau yaitu, Danau Sidenreng dan Danau Tempe yang terletak di Kabupaten Wajo, Danau Towuti dan Danau Matana yang terletak di Kabupaten Luwu Timur. Adapun 7 gunung yang tercatat ada pada sulawesi selatan. Gunung yang tertinggi yaitu Gunung Rantemario yang memiliki ketinggian mencapai 3.470 m diatas permukaan air laut. Gunung Rantemario ini terletak pada perbatasan antara Kabupaten Enrekang dan Luwu.

Provinsi sulawesi selatan pada umumnya daerah di indonesia memiliki dua musim, pada bulan juni sampai dengan bulan september terjadi musim kemarau lalu pada bulan desember sampai dengan bulan maret terjadi musim hujan.

Tabel 4.1.1
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km2)	Persentase (%)
1.	Kepulauan Selayar	1.199,91	2,60
2.	Bulukumba	1.170,10	2,54
3.	Bantaeng	397,06	0,86
4.	Jeneponto	837,99	1,82
5.	Takalar	620,26	1,35
6.	Gowa	1.802,08	3,91
7.	Sinjai	924,15	2,01
8.	Maros	1.538,44	3,34
9.	Pangkep	814,95	1,77
10.	Barru	1.192,39	2,59
11.	Bone	4.593,38	9,97
12.	Soppeng	1.337,99	2,90
13.	Wajo	2.394,15	5,20
14.	Sidrap	2.081,01	4,52
15	Pinrang	1.892,42	4,11
16.	Enrekang	1.821,41	3,95
17.	Luwu	2.940,51	5,20
18.	Tana Toraja	2.149,67	4,66
19.	Luwu Utara	7.365,51	15,98
20.	Luwu Timur	7.315,77	15,87
21.	Toraja Utara	1.169,95	2,54
22.	Makassar	181,35	0,39
23.	Pare – pare	88,92	0,15
24.	Palopo	254,57	0,55
	Sulawesi Selatan	**46.083,94**	**100,00**

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2017

4.1.2 Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Selatan

Pembangunan ekonomi berlasung secara berkesinambungan apabila tidak disertai dengan penduduk yang memiliki semangat dan daya saing kerja yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan aktivitas agar mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya. Aset suatu wilayah dalam pembangunan ekonomi yang lebih cepat yaitu jumlah penduduk terbilang besar, akan tetapi dapat berdampak negatif jika tidak disertai dengan peningkatan kualitas sesuai dengan pengembangan dalam dunia kerja.

Tabel 4.1.2
Pertumbuhan penduduk sulawesi selatan menurut Kabupaten/Kota tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk	Persentase (%)
1.	Kepulauan Selayar	127.220	1,52
2.	Bulukumba	404.896	4,85
3.	Bantaeng	181.006	2,17
4.	Jeneponto	351.111	4,21
5.	Takalar	280.590	3,36
6.	Gowa	696.096	8,34
7.	Sinjai	234.886	2,82
8.	Maros	331.796	3,98
9.	Pangkep	317.110	3,80
10.	Barru	169.302	2,03
11.	Bone	734.119	8,80

12.	Soppeng	225.512	2,70
13.	Wajo	390.603	4,68
14	Sidrap	283.307	3,40
15.	Pinrang	361.293	4,33
16.	Enrekang	196.394	2,35
17.	Luwu	343.793	4,12
18.	Tana Toraja	226.212	2,71
19.	Luwu Utara	297.313	3,56
20.	Luwu Timur	263.012	3,15
21.	Toraja Utara	222.393	2,67
22.	Makassar	1.408.072	16,88
23	Pare – pare	135.192	1,62
24	Palopo	160.819	1,93
	Sulawesi Selatan	**8.342.047**	**100,00**

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2017

Pada tabel 4.1.2 berdasarkan kepadatan penduduk pada kota makassar dengan jumlah penduduk terpadat sejumlah 1.408.072 jiwa disusul dengan kabupaten Bone dengan jumlah kepadatan penduduk 734.119 jiwa, dan kabupaten gowa dengan jumlah penduduk 696.096. kepadatan penduduk yang memiliki penyebaran yang terrendah yaitu pada Kepulauan Selayar dengan jumlah 127.220 jiwa, kemudian kota pare – pare yaitu 135.192 jiwa, dan kota palopo dengan jumlah 160.819 jiwa.

4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran nyata dari suatu kebijakan pembangunan perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi terbentuk dalam berbagai macam sektor ekonomi yang menggambarkan secara tidak langsung tingkat perubahn ekonomi. Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang memiliki banyak maanfaat yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kemajuan ataupun perkembangan ekonomi disuatu daerah di masa yang akan datang.

Peruoduk domestik regional bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah pada tahun tertentu dari nilai tahun sebelumnya. PDRB atas harga yang berlaku menrupakan nilai tambah barang dan jasa di hitung dalam harga yang berlaku setiap tahunnya, sedangkan PDRB atas harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa di hitung dalam harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tercermin pada pertumbuhan setiap tahunnya yang dapat dilihat pada Produk domestik Regional bruto. keberhasilan dalam pembangunan suatu daerah dapat di lihat pada Produk Domestik Regional Bruto atau pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi dengan peran pemerintah di dalamnya Sulawesi selatan misalnya pertumbuhan ekonominya

mengalami peningkat pada tahun tertentu seperti tabel yang ada dibawah dapat dijelaskan bahwa:

Tabel 4.1.3
Pertumbuhan Ekonomi atas harga konstan provinsi sulawesi selatan tahun 2011- 2019

Tahun	PDRB (Milyar)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2011	185.708.474	8,13%
2012	202.184.588	8,87%
2013	217.589.132	7,62%
2014	233.988.051	7,54
2015	250.802.993	7,9
2016	269.401.313	7,42
2017	288.814.171	7,21
2018	309.243.627	7,07
2019	330.605.133	6,92

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan dari tabel 4.1.3 diatas pada tahun 2011 – 2019, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan stabil dengan 7,0% pertahun. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal ini ditunjukan pada pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan pada tahun 2012 yakni 8,87% dari yang sebelumya pada tahun 2011 dengan tingkat pertumbuhan 8,13% kemudian mengalami pertumbuhan walaupun agak lambat 7,62 % pada tahun 2013. Pada tahun 2016

pertumbuhan ekonomi sulawesi selatan kembali membaik dalam angka 7,42% tingkat pertumbuhan ekonomi terrendah berada pada tahun 2019 sebesar 6,92%.

4.1.4 Investasi

Investasi merupakan aktiva yang digunakan perusahaan untuk memperoleh kekayaan melalui distribusi hasil investasi (misalnya pedapatan, bunga , royalty , deviden, pendapatan sewa dan lain sebagainya) agar memiliki apresiasi investasi, bagi perusahaan yang melakukan investasi memiliki manfaat seperti hubungan dagang yang luas. Investasi menurut sumber modal terbagi dua yaitu:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri
2. Penanaman Modal Asing

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat dengan adanya investasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perekonomian suatu daerah tidak lepas dari peranan investasi Sulawesi Selatan, misalnya investasi yang ditanamkan di sulawesi selatan dalam melakukan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan masuknya investasi yang meningkat secara terus menerus dengan melihat kemampuan daerah dan kemampuan nasional agar investasi meningkat. Realisasi investasi di Sulawesi selatan berasal dari realisasi investasi proyek yang dijalankan dan telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adanya investasi pada tahun tertentu.

Realisasi investasi provinsi sulawesi selatan dapat dibagi dua berdasarkan proyek yaitu penanaman modal dalam negeri yang dilakukan pada perusahaan tertentu yang memiliki kriteria dalam melakukan penanaman modal seperti PT ataupun perusahaan lainnya, penanaman modal asing memberikan dalam hal alih teknologi, keterampilan manajamen, dan terbukanya lapangan kerja. Penanaman modal asing sangat penting bagi negara yang berkembang dengan keterbatasan kemampuan pemerintahan untuk ketersediaan lapangan pekerjaan.

Berikut realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing:

Tabel 4.1.4 Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 – 2019

tahun	PMDN (Milyar)	PMA (US$)
2011	3.986.300.000	89.600.000
2012	2.318.900.000	582.600.000
2013	921.000.000	462.800.000
2014	4.949,600.000	280.900.000
2015	9.215,300.000	233.300.000
2016	3.334,600.000	372.500.000
2017	1.969,400.000	712.800.000
2018	3.275,900.000	617.200.000
2019	5.627,600.000	302.600.000

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel 4.1.4 dapat dijelaskan bahwa nilai realisasi Penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada tahun 2011 – 2019 mengalami penurunan investasi dimana pada tahun 2011 3.986.300.000 juta rupiah kemudian pada tahun 2012 dan 2013 penanaman modal dalam negeri mengalami penurunan yang cukup singnifkan. Kemudian pada tahun 2014 penanaman modal dalam negeri di provinsi sulawesi selatan kembali mengalami kenaikan yang cukup besar dengan jumlah 4.949.000.000 juta rupiah. Provinsi sulawesi selatan mengalami krisis ekonomi berdasarkan jumlah penanaman modal yang menurun dan kurangnya keahlian dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Penanaman Modal Asing (PMA) terjadi peningkatan pada tahun 2012 sebesar US$ 582.600.000 lalu terjadi penurunan pada tahun 2013 dengan jumlah US$ 462.800.000 lalu pada tahun 2015 terjadi penuruna sebesar 233.300.000 US$ investor asing tidak melakukan penanaman modal akibat dari nilai tukar rupiah yang melemah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut Didit Herlianti (2013), investasi adalah suatu harapan dan resiko untuk memperoleh keuntungan dari suatu objek, investor mampu melihat hal tersebut dengan baik potensi yang berada di provinsi sulawesi selatan agar memberikan kesan menarik pada investor – investor asing agar menanmankan modal di daerah.

Investasi penanaman modal asing memberikan peluang pada investor untuk menanamankan modalnya untuk mendapatka keuntungan di masa yang akan datang tetapi jika nilai tukar rupiah melememah makan semakin sulit untuk memperoleh penanaman modal karena investor asing tidak memiliki keinginan menanamkan modalnya di provinsi sulawesi selatan. Semakin baik suatu perekonomian suatu daerah makan semakin banyak investor asing untuk menanamkan modalnya untuk proyek – proyek tertentu. Dengan sumber daya yang ada di provinsi sulawesi selatan untuk memikat para investor.

4.1.5 Belanja Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam belanja pemerintah keuangan daerah dengan membiayai pembangunan disuatu daerah agar mempercepat pertumbuhan ekonominya. Belanja pemerintah dapat dibagi dua yaitu:

Belanja langsung adalah kegiatan dan program yang berkaitan langsung. Kegiatan tersebut tidak terlaksana tanpa adanya pembiayaan ini. Belanja ini dapat dibagi atas belanja pegawai pengeluaran yang dilakukan untuk membayar honor/upah, belanja barang jasa yang dilakukan untuk pengadaan atau pembelian barang kurang dari 12 bulan dalam pemakai jasa agar program dan kegiatann pemerintah terlaksana dengan baik dan belanja modal adalah pengadaan atau pembelian yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan yang dapat

digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti jalan, irigasi, tanah, mesin bangunan, dan aset tetap lainnya.

1. Belanja tidak langsung adalah belanja daerah yang tidak memiliki hubungan langsung dengan program dan kegiatan yang terlaksana. Belanja ini terdiri dari belanja pegawai yang diberikan dalam bentuk upah dan tunjangan yang diberikan pada pegawai negeri sipil yang ada dalam perundang – undangan yang terkait, belanja bunga merupakan pembayaran bunga utang dari kewajiban pokok hutang atas perjanjian pinjaman dari jangka pendek jangka menengah maupun jangka panjang, belanja hibah menggarkan dana dalam bentuk uang barang dan jasa pada pemerintah ataupn pemerintah daerah yang telah memiliki peruntukan yang jelas bagi kelompok masyarakat atau perseorangan, bantuan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemberian bantuan berupa uang dan barang pada masyarakat, belanja bagi hasil bantuan keuangan khusus yang berasal provinsi ke kabupaten/kota, bantuan keuangan anggaran yang bersifat umum dari provinsi ke kabupaten/kota, belanja tak terduga merupakan belanja yang tidak diharapkan atau tak terduga seperti penanggulangan benca alam.

Belanja pemerintah memiliki peranan instrumen fiskal atas fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Maka peran pemerintah sangat tercermin dari belanja pemerintah setiap tahunnya, adapun data

mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah pada tabel 4.1.5 sebagai berikut:

Tabel 4.1.5
Realisasi Belanja pemerintah menurut jenis pengeluaran tahun 2011 – 2019

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Pembiayaan Daerah	Total
2011	1.820.969.739	1.356.073.571	224.038.277	3.401.081.587
2012	3.135.433.892	1.468.214.388	42.653.396	4.646.301.676
2013	3.572.588.057	2.071.809.060	1.630.000	5.646.027.117
2014	3.446.840.488	2.153.546.288	242.455.881	5.842.842.657
2015	3.798.198.140	2.351.406.402	265.955.474	6.415.560.016
2016	4.635.403.139	2.295.575.529	361.565.497	7.292.544.165
2017	6.591.338.410	2.558.122.414	136.000.000	9.285.460.824
2018	6.538.263.393	2.783.889.595	122.405.020	9.444.558.008
2019	6.841.547.119	3.058.348.937	200.000.500	10.099.896.556

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dapat dilihat pada tabel 4.1.5 diatas bahwa secara keseluruhan belanja pemerintah pada tahun 2011 – 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Belanja pemerintah pada tahun 2011 sebesar 3.401.081.587 kemudian meningkat secara signifikan setiap tahunnya

belanja pemerintah yang tertinggi pada tahun 2019 sebesar 10.099.896.556 Milyar Rupiah.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil perhitungan SPSS nilai VIF variabel PMDN 1,100 , VIF variabel PMA 1,359 , VIF varibel Belanja Pemerintah 1,403 . variabel PMDN, PMA dan Belanja Pemerintah disimpulkan bahwa uji multikolinearitas bebas dari multikolinearitas dengan nilai tolerance >0,10 atau nilai VIF <10 yang dimana VIF berada diantara 0,10 dan 10 dapat diabaikan.

2. Hasil uji autokorelasi

Pengujian melalui SPSS dapat diperoleh dengan hasil yang berada pada tabel di bawah.

Tabel 4.2.1Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.923[a]	.853	.764	.29655	1.498

a. Predictors: (Constant), BP, PMDN, PMA
b. Dependent Variable: PE

Berdasarkan nilai DW 1,498 yang berada antara (1,55 – 1,54) bahwa tidak adanya kesimpulan apakah ada atau tidak ada autokolerasi .

4.2.2 Pengujian Hipotesis

Hasil uji hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kofisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.2.2

Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.923[a]	.853	.764	.29655

a. Predictors: (Constant), BP, PMDN, PMA

b. Dependent Variable: PE

Dari hasil pengujian diatas meggunakan SPSS bahwa nilai adjusted R^2 dengan jumlah 0,764. Dengan ini 7,64% variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu variabel PMDN, PMA dan Belanja Pemerintah.

2. Uji simultan (Uji F)

Berdasarkan uji F dapat memperoleh pengaruh secara keseluruhan dari tiga variabel independen PMDN, PMA, dan Belanja Pemerintah pada variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.2.3

Hasil simultan (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.543	3	.848	9.640	.016[b]
	Residual	.440	5	.088		
	Total	2.983	8			

a. Dependent Variable: PE

b. Predictors: (Constant), BP, PMDN, PMA

Perhitungan SPSS menunjukkan nilai F hitung sebesar 9.640 dengan tingkat signifikansi 0,016 > 0,05 tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 , maka dapat diketahui bahwa model regresi tersebut dapat dilakukan untuk mengetahui variabel dependen pertumbuhan ekonomi, kemudian dapat disimpulkan variabel independen PMDN (X1), PMA (X2), dan Belanja Pemerintah (X3) secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

3. Uji parsial (Uji T)

Berdasarkan hasil uji SPSS secara parsial pengaruh variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan pada tabel dibawah:

Tabel 4.2.4

Hasil Uji Parsial(Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.957	.347		25.832	.000
	PMDN	-4.683E-13	.000	-.234	-1.301	.250
	PMA	1.558E-9	.000	.519	2.591	.049
	BP	-2.883E-10	.000	-1.092	-5.371	.003

a. Dependent Variable: PE

pada tabel 4.2.4 di atas dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e

LnY = a + b1 LnX1 + b2 LnX2 + b3 LnX3 + e

LnY= 8,957 + -4,683 lnX1 + 1,558 lnX2 + -2,883 lnX3 + e

Hasil uji t dapat dilakukan pembahasan hipotesis yang diajukan yaitu:

a. Hipotesis 1 : PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan uji t memberikan hasill bahwa nilai t hitung sebesar -1,301dan t tabelnya 2,262 dengan tingkat signifikansi 0,250. Dari t hitung

< t tabel (-1,301 < 2,262) dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05.

Maka Hipotesis nol (H0) diterima hasil dari uji t tersebut menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN) X1 tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian hipotesis secara kolerasi tidak sesuai secara parsial variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak.

Persamaan regresi linear berganda koefisien regresi PMDN X1 yaitu -4,683. Maka koefisien tesebut tidak adanya hubungan yang positif dengan variabel Penanaman Modal Dalam Negeri kepada variabel petumbuhan ekonomi. Walaupun Penanaman Modal dalam negeri setiap tahunya mengalami peningkatan maka hal tersebut tidak meningkatkan beberapa persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Asiyan dengan judul " Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Dan Ekspor Terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2002 – 2011.

b. Hipotesis 2 : PMA berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan uji t dapat memberikan hasil dimana nilai t hitung 2,591 dan t tabel 2,262 dengan tingkat signifikansinya 0,049. Hasil yang didapat

dari t hitung > t tabel (2,591 > 2,262) dengan tingkat signifikan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis nol (Ho) di tolak dan Hipotesis Alternatif (Ha) di terima.

Dengan demikian hasil uji t menyatakan bahwa variabel Penanaman Modal Asing (PMA) Berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan korelasi sesuai dengan hipotesis yang signifikan secara statistik, maka PMA berpengaruh penting terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Persamaan Regresi Linear Berganda koefisien regresi Penanaman Modal asing X2 yaitu 1,558. Maka koefisien tersebut adanya hubungan positif antara variabel Penanaman Modal Asing (X2) pada variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y). Maka kenaikan setiap 1 persen variabel X2 mengalami peningkatan terhadap variabel Y yaitu 1,588 bahwa mempengaruhi secara signifikan.

c. Hipotesis 3 : Belanja Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan uji t dapat memberikan hasil dimana nilai t hitung -5,371 dan t tabel 2,262 dengan tingkat signifikansi 0,003. Hasil yang di dapat t hitung > t tabel (-5,371 > 2,262) dengan tingkat signifikan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis nol (Ho) ditolak dan Hipotesis alternatif (Ha) diterima.

Dengan demikian hasil uji t bahwa variabel Belanja Pemerintah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di provinsi sulawesi

selatan dengan kolerasi sesuai dengan hipotesis yang signifikan secara statistik, maka Belanja Pemerintah berpengaruh penting terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Persamaan regresi linear berganda koefisien Belanja Pemerintah X3 yaitu -2,883. Maka koefisien tersebut adanya hubungan positif antara variabel Belanja Pemerintah (X3) pada variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y). Maka kenaikan setiap 1 persen variabel X3 mengalami peningkatan terhadap variabel Y yaitu -2,883 bahwa mempengaruhi secara signifikan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 PMDN

Berdasarkan dari uji t pada tabel 4.8 dengan hasil nilai t hitung -1,310 dan t – tablenya 2,262 dengan tingkat signifikansi 0,250. Jika t hitung < t tabel (-1,310 < 2,262) . maka hasil penelitian ini memberikan hasil bahwa peningkatan maupun penurunan dari variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada periode penelitian ini tidak berpengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi provinsi sulawesi selatan dalam hal ini seberapa besar kenaikan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam perhitungan SPSS pada hasil diatas tidak terdapat persamaan dengan menunjukkan konsistensi pada teori yang menyebutkan bahwa investasi dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi. Harrod – domar 1947 menyatakan bahwaa teori investasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Penanaman modal dalam negeri di provinsi sulawesi selatan periode penelitian ini pada kenyataannya tidak memiliki tingkat signifikansi atau tidak berpengaruh positif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Realisasi investasi penanaman modal dalam negeri di setiap tahunnya memiliki penurunan meberikan pengaruh yang kurang baik berbeda dengan penanaman modal asing. Dengan meningkatkankan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di provinsi sulawesi selatan ketersediaan barang publik maka secara berkesinambungan terhadap perannya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4.3.2 PMA

Berdasarkan dari uji t pada tabel 4.8 dengan hasil t hitung 2,591 dan t tabelnya 2,262 dengan tingkat signifikansi 0,049. Jika t hitung > t tabel (2,591 > 2,262). maka hasil penelitian ini memberikan hasil bahwa peningkatan maupun penurunan dari variabel Penanaman Modal Asing (PMA) pada periode penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonnomi Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam perhitungan spss diatas dapat persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herman Kambono dan Elyzabet Indrawati Marapaung (2017) dengan judul “ Pengaruh

Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2005 – 2009. Penanaman modal asing PMA dalam hal ini memliki peran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, peran kemajuan teknologi yang dimiliki oleh Penanaman Modal Asing sangat berperan penting.

Menarik minat investasi penanaman modal asing pemerintah daerah dengan hukum yang telah pasti dalam hal ini proses perizinan, stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kualitas smber daya manusia agar nilai Penanaman Modal Asing (PMA) akan semakin meningkat secara tidak langsung mampu meningkatkan pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

4.3.3 Belanja Pemerintah

Berdasarkan dari uji t pada tabel 4.8 dengan hasil t hitung -5,371 t tabelnya 2,262 dengan tingkat signifikansi 0,003. Jika t hitung > t tabel (-5,371 > 2,262. Maka hasil penelitian ini memberikan hasil peningkatan maupun penurunan dari variabel Belanja Pemerintah pada periode penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi selatan.

Dalam perhitungan SPSS diatas dapat simpulkan bahwa Belanja Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. terjadi kosistensi pada pengembangan teori bahwa belanja pemerintah memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi jika digunakan dengan sesuai kebutuhan. Penelitian ini diperkuat dari

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Efrizal Hasan, Syamsul Amar , ali Anis (2014) dengan judul " Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat" memiliki hasil bahwa belanja pemerintah memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Belanja pemerintah sangat mencerminkan kebijakan – kebijakan pengeluaran pemerintah hal ini dapat di ambil permisalan pada pendaptan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah meningkat .

Provinsi Sulawesi Selatan Dengan perkembangan laju penerimaan dan pengeluaran pemerintah dengan sistem perekonomian yang lebih baik. Pemerintah mengalokasikan belanja tidak langsung maupun belanja langsung secara proposional agar dapat memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi di Porvinsi Sulawesi Selatan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan pengaruh investasi dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sulwesi selatan, bahwa Penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi sulawesi selatan periode 2011 – 2019 sedangkan Penanaman modal Asing dan Belanja Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

5.2 Saran

Pemerintah daerah sebaiknya lebih memperbaiki kebijakan – kebijakan dalam stabilitas ekonomi agar dapat meningkatkan investasi dalam hal ini Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat menunjang serta memberikan kemudahan bagi yang ingin berinvestasi agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ambok Pangiuk. " *pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi jambi" studi kasus 2012-2015*

Ana Rokhmatussa'dyah & Suratman,*Hukum Investasi & Pasar Modal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),*

BPS. 2018. Produk Domestik Regional Bruto. Sulawesi Selatan.

BPS. Berbagai tahun *dalam angka sulawesi selatan.*

Badan pusat statistik provinsi sulawesi selatan, *analisis keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota provinsi sulawesi selata*n *2018.*

Elvandry Tandiawan, Amran Naukoko dan Patrick Wauran .*Pengaruh Investasi Swasta Dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja Di Kota Manadotahun 2001-2012*

Rinaldi Rafli 2013. Analisis Pengaruh KomsumsiI Pemerintah,Investasi Pemerintah, Invetasi Swasta, Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (Sttudi Kasus Provinsi JawaTimur Tahun 2007-2011)

Sukirno, Sadono. 2011. Makro ekomomi teori pengantar edisi ketiga. Rajawali pers, jakarta.

Galih. 2012. *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Angka Melek Perempuan Di Kabupaten/ Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Harry A. P. Sitaniapessy, " *pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan PAD",* Jurnal ekonomi volume 9, nomor1, (2013) hlm, 40.

Herlianto, Didit. 2013. Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong. Yogyakarta.

Herman Kambono, Elyzabet Indrawati Marapaung. 2014. " Pengaruh Investasi Asing Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Tambunan taulus, T.H, Perekonomian indonesia. Jakarta, Gholia Indonesia , 2001

I Gusti Ayu Putri wahyuni. " *pengaruh pengeluaran pemrintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan kaabupaten/kota provinsi bali. 2014*

Kemendagri.co.id 2006, "*Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah"*

Muta'ali, Lutfi.2015. Teknik Analisis Ragional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas gegrafi (BPFG) Universitas Gajah Mada

Prasetyo, P.2009. *Eko fundamental makro ekonomi (yogyakarta: beta Offset)*

Salim HS dan Budi sutrisno , *Hukum Investasi Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers 2008.*

Suliyanto, Dr. 2011. Ekonomitrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS.

Siti Aminah. 2016. " *Analisis pengaruh investasi swasta pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di provinsi jambi.*

Suryana, 2000, *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.*

Sri Asiyan . " Penagaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur.

Winantyo, R,dkk, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Memperkuat Sinergi ASEAN Ditengah kompetisi Global .(jakarta. Eleex Media Komputindo . 2008,

LAMPIRAN

Lampiran 1: PDRB Atas Dasar Konstan Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah) Sulawesi Selatan Tahun 2011 – 2019

Tahun	PDRB (Milyar)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PMDN (Milyar Rp)	PMA (US$)	Belanja Pemerintah (Milyar Rp)
2011	185.708.474	8,13	3.986.300.000	89.600.00	3.401.081.587
2012	202.184.588	8,87	2.318.900.000	582.600.000	4.646.301.676
2013	217.589.132	7,62	921.000.000	462.800.000	5.646.027.117
2014	233.988.051	7,54	4.949,600.000	280.900.000	9.842.842.657
2015	250.802.993	7,9	9.215,300.000	233.300.000	6.415.560.016
2016	269.401.313	7,42	3.334,600.000	372.500.000	7.292.544.165
2017	288.814.171	7,21	1.969,400.000	712.800.000	9.285.460.824
2018	309.243.627	7,07	3.275,900.000	617.200.000	9.444.558.008
2019	330.605.133	6,92	5.627,600.000	302.600.000	10.099.896.556

Lampiran 2: Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menurut Kabupaten/Kota tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km2)	Persentase (%)
1.	Kepulauan Selayar	1.199,91	2,60
2.	Bulukumba	1.170,10	2,54
3.	Bantaeng	397,06	0,86
4.	Jeneponto	837,99	1,82
5.	Takalar	620,26	1,35
6.	Gowa	1.802,08	3,91
7.	Sinjai	924,15	2,01
8.	Maros	1.538,44	3,34
9.	Pangkep	814,95	1,77
10.	Barru	1.192,39	2,59

11.	Bone	4.593,38	9,97
12.	Soppeng	1.337,99	2,90
13.	Wajo	2.394,15	5,20
14.	Sidrap	2.081,01	4,52
15	Pinrang	1.892,42	4,11
16.	Enrekang	1.821,41	3,95
17.	Luwu	2.940,51	5,20
18.	Tana Toraja	2.149,67	4,66
19.	Luwu Utara	7.365,51	15,98
20.	Luwu Timur	7.315,77	15,87
21.	Toraja Utara	1.169,95	2,54
22.	Makassar	181,35	0,39
23.	Pare – pare	88,92	0,15
24.	Palopo	254,57	0,55
	Sulawesi Selatan	**46.083,94**	**100,00**

Lampiran 3: Pertumbuhan penduduk sulawesi selatan menurut Kabupaten/Kota tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk	Persentase (%)
1.	Kepulauan Selayar	127.220	1,52
2.	Bulukumba	404.896	4,85
3.	Bantaeng	181.006	2,17
4.	Jeneponto	351.111	4,21
5.	Takalar	280.590	3,36
6.	Gowa	696.096	8,34
7.	Sinjai	234.886	2,82
8.	Maros	331.796	3,98

9.	Pangkep	317.110	3,80
10.	Barru	169.302	2,03
11.	Bone	734.119	8,80
12.	Soppeng	225.512	2,70
13.	Wajo	390.603	4,68
14	Sidrap	283.307	3,40
15.	Pinrang	361.293	4,33
16.	Enrekang	196.394	2,35
17.	Luwu	343.793	4,12
18.	Tana Toraja	226.212	2,71
19.	Luwu Utara	297.313	3,56
20.	Luwu Timur	263.012	3,15
21.	Toraja Utara	222.393	2,67
22.	Makassar	1.408.072	16,88
23	Pare – pare	135.192	1,62
24	Palopo	160.819	1,93
	Sulawesi Selatan	8.342.047	100,00

Lampiran 4 :Pertumbuhan Ekonomi atas harga konstan provinsi sulawesi selatan tahun 2011- 2019

Tahun	PDRB (Milyar)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2011	185.708.474	8,13%
2012	202.184.588	8,87%
2013	217.589.132	7,62%
2014	233.988.051	7,54
2015	250.802.993	7,9
2016	269.401.313	7,42
2017	288.814.171	7,21
2018	309.243.627	7,07
2019	330.605.133	6,92

Lampiran 5: Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 – 2019

tahun	PMDN (Milyar)	PMA (US$)
2011	3.986.300.000	89.600.000
2012	2.318.900.000	582.600.000
2013	921.000.000	462.800.000
2014	4.949,600.000	280.900.000
2015	9.215,300.000	233.300.000
2016	3.334,600.000	372.500.000
2017	1.969,400.000	712.800.000
2018	3.275,900.000	617.200.000
2019	5.627,600.000	302.600.000